

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi suatu daerah atau suatu negara selalu diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai sebuah negara di mana pembangunan nasionalnya pada hakikatnya memiliki salah satu tujuan yaitu memajukan kesejahteraan umum (Tindoan, 2010).

Kewajiban bekerja telah banyak ditulis dalam firman Allah SWT, salah satunya dalam QS. At-Taubah [9]:105 yang artinya: Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Penduduk sebagai objek dan juga subjek dalam pembangunan harus di bina dan diberi pelatihan, sehingga penduduk bisa menjadi penggerak pembangunan dan penduduk itu sendiri bisa menikmati hasil pembangunan tersebut. Oleh karena itu pembangunan daerah harus dikembangkan dan dilaksanakan dengan bantuan penduduk, sehingga penduduk bisa ikut serta berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan dikatakan berhasil ketika pembangunan tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan penduduknya sendiri.

Indikator keberhasilan ekonomi dari suatu pembangunan ekonomi bukan hanya dilihat dari adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi dari bagaimana cara menyelesaikan masalah penuntasan ketenagakerjaan. Dengan adanya kesempatan kerja yang tinggi tenaga kerja akan terserap secara optimal dan kemajuan dari ekonomi masyarakat akan berubah menjadi semakin baik. Penghasilan yang di dapat oleh masyarakat dalam bentuk upah yang diperoleh dari hasil bekerja dapat memenuhi kebutuhan mereka, maka tujuan dari pembangunan itu sendiri bisa mensejahterakan masyarakat dapat tercapai. (Alexan dan Marshefani, 2013) Penyediaan kesempatan kerja bagi penduduk sedang dihadapi oleh para pemerintah di Pulau Jawa, tenaga kerja menjadi faktor penting dalam proses produksi dan kesejahteraan bagi masyarakat. Berikut perkembangan keadaan ketenagakerjaan di Pulau Jawa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 (BPS, 2018).

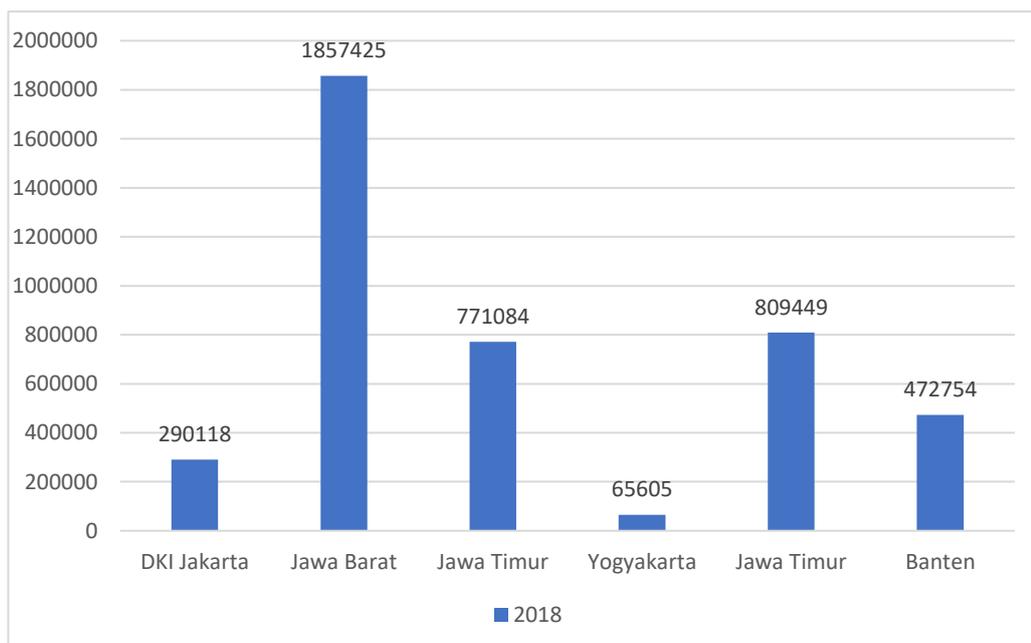
TABEL 1.1
Keadaan Ketenagakerjaan di Pulau Jawa Tahun 2012-2018 (Jiwa)

Tahun	Kegiatan		
	Bekerja	Pengangguran	Angkatan Kerja
2014	66.532.537	4.595.611	71.128.148
2015	66.035.108	4.523.379	70.558.487
2016	66.820.466	4.387.113	71.207.579
2017	69.477.208	4.432.389	73.909.597
2018	70.653.052	4.397.978	75.051.030

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Dari Tabel 1.1 di atas dapat menjelaskan bagaimana kondisi tenaga kerja yang ada di Pulau Jawa, di mana pada tabel angkatan kerja cenderung untuk mengalami peningkatan, dari semula pada tahun 2014 sebesar 71.128.148 jiwa terus meningkat hingga pada tahun 2018 sebesar 75.051.030 jiwa, peningkatan

ini sejalan dengan adanya peningkatan penduduk yang bekerja dari semula pada tahun 2014 sebanyak 66.532.537 jiwa terserap oleh tingginya pasar tenaga kerja di Pulau Jawa mencapai 70.653.052 jiwa, sehingga walaupun pengangguran fluktuatif dalam perubahannya namun perubahan angka pengangguran tersebut cenderung menurun dari semula pada tahun 2014 angkanya mencapai 4.595.611 jiwa terus menurun ke angka 4.397.978 jiwa pada tahun 2018. Dibutuhkannya peningkatan penyerapan tenaga kerja untuk mengimbangi laju dari pertumbuhan angkatan kerja yang baru masuk ke pasar tenaga kerja. Ketika ke tidak seimbangan antara laju pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja maka yang terjadi angka pengangguran akan meningkat. Berikut adalah gambar yang menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Provinsi yang berada di Pulau Jawa pada tahun 2018 per bulan Agustus:

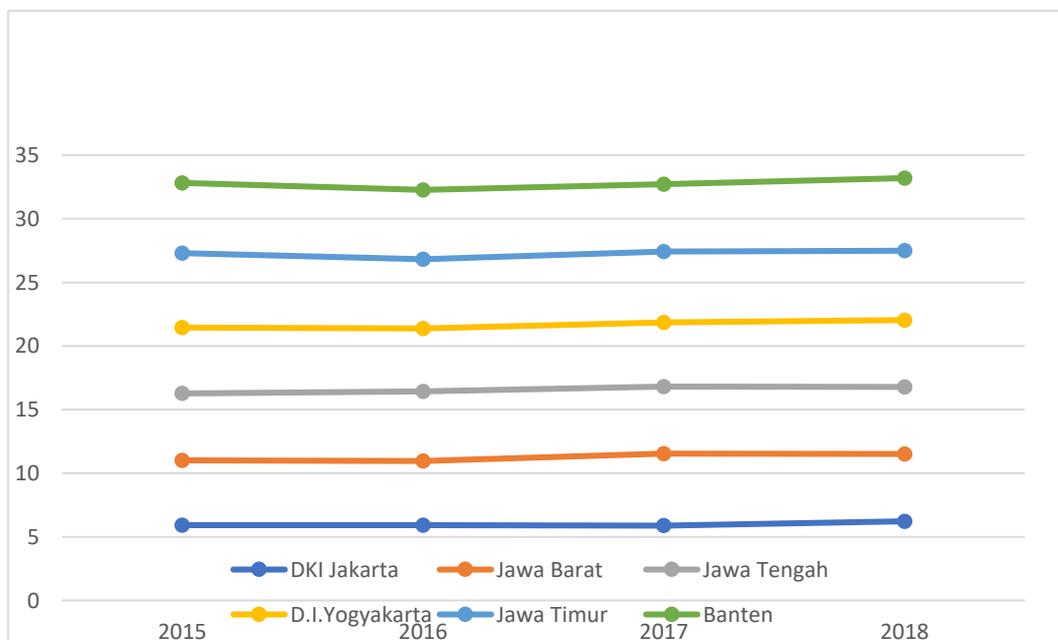


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

GAMBAR 1.1
Pengangguran Terbuka Setiap Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2018 (Jiwa)

Pada gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di provinsi yang berada di Pulau Jawa terbanyak pada tahun 2018 adalah Jawa Barat sebesar 1857425 jiwa, dan jumlah tingkat pengangguran terendah yaitu Yogyakarta 65605 jiwa.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi tolak ukur untuk menentukan keberhasilan suatu ekonomi, menurut (Boediono, 1992) pertumbuhan ekonomi yaitu peningkatan *output* setiap masyarakat yang dipengaruhi banyaknya faktor produksi digunakan tanpa merubah caranya dan teknologi yang digunakan, pertumbuhan ekonomi memberi indikasi sejauh mana aktifitas perekonomian pada suatu periode telah menghasilkan pendapatan atau penghasilan untuk masyarakat.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

GAMBAR 1.2
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Setiap Provinsi di Pulau Jawa (persen)

Pada gambar 1.2 di atas menjelaskan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto setiap provinsi di Pulau Jawa mengalami fluktuasi di setiap tahunnya, pada tahun 2015 PDRB Provinsi Jawa Barat terkecil di pulau Jawa hanya 5,09% dan terbesar Provinsi DKI Jakarta sebesar 5,91% hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat investasi. Pada tahun 2018 PDRB terkecil berada di D.I.Yogyakarta sebesar 5,26% tetapi nilai ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 5,05% dan terbesar berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 6,22% pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 2017 sebesar 5,88% hal ini terjadi karena meningkatnya pertumbuhan investasi dan ekspor dibanding tahun sebelumnya.

Dalam penelitian yang dilakukan (Biamrillah & Nurhayati, 2018) serta (Syafri & Zulfanetti, 2018) menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap tenaga kerja. Karena dalam jangka pendek teknologi dianggap konstan, modal merupakan *input* tetap, tenaga kerja yang dianggap variabelnya, pengaruh tersebut sangat terasa pada kesempatan kerja.

Menurut (Sukirno, 1997) kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat pendapatan nasional, maka peningkatan investasi ini akan diikuti oleh penambahan kesempatan kerja yang ada untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja.

TABEL 1.2
Realisasi Investasi di setiap Provinsi di Pulau Jawa (Milyar Rupiah)

Provinsi	Investasi	Investasi
	2017	2018
DKI Jakarta	47262300	49097420
Jawa Barat	38390600	42278210
Jawa Tengah	19866000	27474890
Yogyakarta	294600	613171
Jawa Timur	45044500	33333130
Banten	15141900	18637560

Sumber: BKPS 2019

Tabel 1.2 diatas menjelaskan DKI Jakarta di tahun 2017 dan 2018 menjadi tempat investasi terbesar di Pulau Jawa dengan nilai investasi Rp.47262300 ditahun 2017 dan Rp.49097420 di 2018, alasan DKI Jakarta menjadi tempat investasi terbesar di Pulau Jawa karena DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan ada di sana. Terbesar kedua di tahun 2017 Jawa timur dengan nilai Rp.4504450 dan di 2018 Jawa Barat dengan nilai Rp.42278210, hal tersebut karena di daerah Jawa Timur dan Jawa Barat terdapat banyak pabrik dan industri besar yang beroperasi di kedua daerah tersebut. Invetsasi paling kecil di tahun 2017 dan 2018 yaitu Yogyakarta dengan nilai di tahun 2017 Rp.294600 dana di tahun 2018 Rp.613171, alasan kenapa Yoyakarta menjadi memiliki investasi yang kecil karena investasi di Yogyakarta lebih diarahkan ke pariwisata dan Pendidikan hal tersebut berkenaan dengan peraturan pemerintah Yogyakarta yang tidak membebaskan pendirian pabrik atau indsutri yang besar di daerah Yogyakarta.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sessu, 2015) menemukan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap tenaga kerja, karena semakin besar

tingkat investasi akan semakin banyak kesempatan kerja yang tercipta dan tenaga kerja akan banyak terserap sehingga pengangguran akan semakin sedikit.

Penerapan kebijakan upah minimum adalah salah satu usaha untuk meningkatkan upah perkapita para pekerja sehingga tingkat upah rata-rata tenaga kerja menjadi meningkat, berikut adalah tabel kebutuhan hidup layak (KHL) dan upah minimum provinsi (UMP) perprovinsi di Pulau Jawa dari tahun 2014-2015.

TABEL 1.3
KHL dan UMK di Setiap Provinsi Pulau Jawa
Tahun 2014-2015

Provinsi	2014		2015	
	KHL	UMP	KHL	UMP
DKI Jakarta	2299860	2441000	2538174	2700000
Jawa Barat	946689	1000000	946689	1000000
Jawa Tengah	857728	910000	857728	910000
D.I.Yogyakarta	924284	988500	924284	988500
Jawa Timur	825000	1000000	825000	1000000
Banten	1325000	1170000	1403556	1325000

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

Pada tabel 1.3 rata-rata KHL maupun UMP di setiap provinsi yang berada di Pulau Jawa mengalami kenaikan setiap tahunnya, penetapan upah tersebut disetiap daerahnya berbeda-beda sesuai dengan tingkat kehidupan minimumnya karena setiap daerah memiliki tingkat kebutuhan hidup minimum yang berbeda. Peningkatan upah setiap tahun menyebabkan dilema bagi perusahaan sebab upah sangat berpengaruh terhadap kesempatan kerja. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Gindling & Terrel, 2006) menyatakan bahwa tingkat upah memiliki pengaruh negatif terhadap

penyerapan tenaga kerja, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa setiap 10% kenaikan upah minimum menyebabkan penurunan pekerja 1,09% di masing-masing sektor.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh (Wijaya, Indrawati, & Pailis, 2014) serta (Syafri & Zulfanetti, 2018) menemukan bahwa upah berpengaruh negatif terhadap tenaga kerja. Karena ketika tingkat upah tinggi maka perusahaan harus membayar para tenaga kerja lebih besar dari biasanya otomatis keuntungan yang didapat akan berkurang.

Provinsi yang berada di Pulau Jawa memiliki permasalahan yang ditandai oleh lebih rendahnya kesempatan kerja dibanding dengan angkatan kerja, dalam situasi seperti ini kesempatan kerja perlu ditambah dan melebihi angkatan kerja yang ada untuk mengatasi masalah ke tenaga kerja di masa mendatang. Dari latar belakang di atas dapat diambil judul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa”

B. Batasan Masalah

Dalam melaksanakan penelitian ini agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan karena luasnya permasalahan serta adanya keterbatasan peneliti, maka perlu adanya batasan agar permasalahan yang diberikan lebih terarah dan mudah untuk dimengerti. Berikut adalah pembatasan masalahnya:

1. Variabel yang dianggap dapat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa adalah PDRB, Investasi, dan Upah
2. Data yang digunakan yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 terdiri dari:

- a. Tenaga Kerja yang bekerja
- b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- c. Investasi
- d. Upah Minimum Provinsi (UMP)

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang didapat setelah meninjau dari latar belakang penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa?
2. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa?
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa?
3. Mengetahui seberapa besar Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa?

E. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diambil dengan dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Sebagai media latihan untuk meningkatkan kemampuan juga keterampilan dan ilmu yang telah dipelajari.
2. Sebagai daya dan tolak ukur penelitian-penelitian selanjutnya serta berguna bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan pengembangan di Provinsi yang berada di Pulau Jawa.
3. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi setiap pembaca khususnya mengenai pengaruh penyerapan tenaga kerja di daerah Pulau Jawa.

